

**PEMBENTUKAN *QUADRUPLE SECURITY DIALOGUE* (QSD) SEBAGAI
RESPON TERHADAP IMPLIKASI KEAMANAN *BELT AND ROAD*
INITIATIVE TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

FAHREZA ADITYA PRATAMA

E061191101

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PEMBENTUKAN *QUADRUPLE SECURITY DIALOGUE* (QSD) SEBAGAI RESPON TERHADAP IMPLIKASI KEAMANAN *BELT AND ROAD INITIATIVE* TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK

NAMA : FAHREZA ADITYA PRATAMA

NIM : E061191101

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 Agustus 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,

Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PEMBENTUKAN *QUADRUPLE SECURITY DIALOGUE* (QSD) SEBAGAI RESPON TERHADAP IMPLIKASI KEAMANAN *BELT AND ROAD INITIATIVE* TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK

N A M A : FAHREZA ADITYA PRATAMA

N I M : E061191101

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 9 Agustus 2023.



Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Fahreza Aditya Pratama
NIM : E061191101
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul :

PEMBENTUKAN *QUADRUPLE SECURITY DIALOGUE* (QSD) SEBAGAI RESPON TERHADAP IMPLIKASI KEAMANAN *BELT AND ROAD INITIATIVE* TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK

Merupakan hasil karya studi saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Juni 2023


METERAI
TEMPIL
31AKX605575155
Fahreza Aditya Pratama

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, petunjuk, kekuatan, ilmu, pengetahuan, dan segala nikmat sehingga tugas akhir yang berjudul “Pembentukan *Quadruple Security Dialogue* (QSD) sebagai Respon terhadap Implikasi Keamanan *Belt and Road Initiative* Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik” dapat diselesaikan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dan lulus dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan umpan balik berupa kritik dan saran yang konstruktif agar dapat menjadikan skripsi ini lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para pembaca. Selain itu, penelitian dan pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, dengan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua, Ibu saya **Esa Lestary** yang telah senantiasa memberikan dukungan, do’a, dan perhatian kepada Penulis. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengemban ilmu setinggi mungkin pada bidang yang Penulis pilih. Dengan berakhirnya masa studi S1 Penulis, semoga dapat membawa Penulis kepada kehidupan yang dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan di masa yang akan datang.
2. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D** yang telah banyak berjasa menjadikan Departemen Ilmu

Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin sebagai tempat yang berkualitas untuk menuntut ilmu. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para dosen pembimbing skripsi Penulis, Bapak **Agussalim, S.IP., MIRAP** dan Kak **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** yang memiliki kontribusi yang sangat besar dan sangat berjasa dalam membantu dan membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Berkat arahan dari kedua dosen pembimbing, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA**, Bapak **Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.**, Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.**, Bapak **Drs. H. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec.**, Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., MSi.**, Ibu **Seniwati S.Sos, M.Hum, Ph.D.**, Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.**, Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.**, Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph.D.**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**, Bapak **Dr. Adi Suryadi B, M.A.**, Kak **Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.**, Kak **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, Kak **Bama Andika Putra, S.IP., M.IR.**, Kak **Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., MIR.**, Kak **Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc.,L.LM.**, dan Kak **Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA**. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama 4 tahun ini. Menempuh pendidikan S1 di Departemen ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Penulis tidak hanya mendapatkan ilmu dan pengetahuan, akan tetapi Penulis juga telah diberikan berbagai kesempatan oleh beberapa dosen

untuk menjadi asisten peneliti, yang tentunya menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat dan berharga bagi Penulis. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala manfaat akademik yang telah diberikan.

3. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahma**, **Pak Ridho**, dan **Kak Salmi** yang telah banyak membantu Penulis, khususnya terkait pengurusan berkas dan administrasi. Semoga segala pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan dan akan dilakukan bernilai pahala, dan semoga senantiasa diberikan kemudahan.
4. Keluarga Penulis, mulai dari adik-adik, **Rangga** dan **Aidan**. Semoga masa studi Rangga dan Aidan segera selesai dengan hasil yang terbaik. Kemudian Penulis ucapkan terima kasih untuk keluarga besar. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.
5. *My favorite person*, **Alayda** yang selalu memberikan dukungan emosional dan fisik, serta selalu menemani Penulis untuk menyelesaikan skripsi. Penulis sangat berterima kasih atas kehadiran, bantuan, doa, perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Penulis. Semoga Alay dilancarkan segala urusannya dan berhasil mencapai tujuan hidup yang diinginkan serta diberkati oleh Allah SWT. *I'm so grateful for your existence, always.*
6. Sahabat Penulis, **Rais** dan **Ryan**, terima kasih telah menjadi sahabat seperjuangan dari SD sampai sekarang S1, semoga segala urusan dan rencananya berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah SWT.
7. Seluruh teman-teman HI Angkatan 2019 (Historia), khususnya **Nadya Shalsabillah** sebagai sahabat yang membantu penulis melewati masa

kuliah *through ups and downs*, **Kezia Atirah Monica, Adis Dwi Maghfira, Maya Handayani, Ahmad Abdi, Azzahrah Shafirah T.** dan teman-teman lainnya yang tidak sempat Penulis tuliskan satu per satu. Terima kasih telah menjadi ruang berdiskusi dan berkembang selama menempuh pendidikan sarjana. Semoga teman-teman Historia dapat mencapai cita-cita dan kesuksesan yang diinginkan.

8. Sahabat Music Room, **Baruna, Ridho, Riza, Risdar.** Terima kasih telah menjadi ruang untuk melupakan skripsi untuk sementara. Semoga urusan dan rencananya dilancarkan oleh Allah Swt.
9. Teman-teman Sdkck, **Daffa, Feo, Geo, Fey, June, Iqo, Kia.** Terima kasih telah menjadi teman Penulis selama 4 tahun berkuliah di Departemen Hubungan Internasional, semoga segala urusan dan rencananya dilancarkan.
10. *Last but not least*, terima kasih kepada diri sendiri yang telah berhasil melewati segala rintangan dan tantangan selama melewati masa perkuliahan terutama saat masa penyusunan skripsi. *You should be proud of yourself.*

ABSTRAK

Fahreza Aditya Pratama, E061191101, dengan judul skripsi “Pembentukan *Quadruple Security Dialogue* (QSD) Sebagai Respon terhadap Implikasi Keamanan *Belt and Road Initiative* Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik” dibawah bimbingan Agussalim, S.IP, MIRAP, selaku pembimbing I dan Nurjannah Abdullah, S.IP, MA, selaku pembimbing II Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pembentukan *Quadruple Security Dialogue* (QSD) sebagai respon terhadap implikasi keamanan dari BRI Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik melalui agenda keamanannya yaitu *Malabar Naval Exercise* dan *Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness* (IPMDA) serta untuk mengetahui bagaimana prospek masa depan Quad terhadap keamanan regional Kawasan Indo-Pasifik.

Penelitian ini menggunakan konsep *Security Dilemma* dengan aspek dilema keamanan menurut John Herz yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis mengenai pembentukan Quad dengan agenda keamanannya sebagai respon terhadap BRI Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini juga menggunakan teori *Regional Security Complex* karya Barry Buzan untuk menganalisis mengenai prospek masa depan Quad terhadap keamanan Kawasan Indo-Pasifik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Quad sebagai respon terhadap implikasi keamanan BRI Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik merupakan bentuk dilema keamanan. Dimana Tiongkok yang berupaya untuk meningkatkan keamanan dan pengaruhnya atas pulau yang diklaim di Kawasan Indo-Pasifik menimbulkan rasa tidak aman bagi negara-negara lain di kawasan, sehingga Quad dengan agenda keamanannya terbentuk untuk mengimbangi ancaman Tiongkok di kawasan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa terdapat interdependensi keamanan dari unit-unit yang berada di kawasan dan saling berdekatan. Sehingga prospek masa depan Quad akan sangat ditentukan oleh perilaku Tiongkok di kawasan dan bagaimana negara-negara anggota Quad meresponnya

Kata Kunci : Quad, *Security Dilemma*, BRI, *Malabar Naval Exercise*, Indo-Pasifik

ABSTRACT

Fahreza Aditya Pratama, E061191101, with the thesis entitled “Formation of Quadruple Security Dialogue (QSD) as a Response to China’s Belt and Road Initiative Security Implications in the Indo-Pacific Region” under the supervision of Agussalim, S.IP, MIRAP, as Advisor I and Nurjannah Abdullah, S.IP, MA, as Advisor II of the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University.

This study aims to analyze the formation of Quadruple Security Dialogue as a response to China’s BRI security implications in the Indo-Pacific Region through its security agenda that is Malabar Naval Exercise and Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness as well as to know about the future prospects of Quad on regional security in the Indo-Pacific Region.

This research operates the security dilemma theory based on John Herz work which researcher will use to analyze the formation of Quad with its security agenda as a response against China’s BRI in the Indo-Pacific Region. This study also uses Barry Buzan's Regional Security Complex theory to analyze the future prospects of the Quad for the security of the Indo-Pacific Region.

The results of this study indicate that the formation of the Quad as a response to China's BRI security implications in the Indo-Pacific Region is a form of security dilemma. Where China is trying to increase its influence and security over the islands it claims in the Indo-Pacific region creates a sense of insecurity for other countries in the region so that the Quad with its security agenda is formed to balance China's threats in the region. In addition, researchers also found that there is security interdependence from units located in the area and close to each other. So the future prospects of the Quad will be largely determined by China's behavior in the region and how the Quad member states respond to it.

Keywords : Quad, Security Dilemma, BRI, Malabar Naval Exercise, Indo-Pasifik

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	III
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK.....	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR BAGAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.1 <i>Security Dilemma</i>	9
1.4.2 <i>Regional Security Complex Theory</i>	11
1.4.3 Model Analisis	14
1.5 Metode Penelitian	14
1.5.1 Jenis Penelitian	14
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.5.3 Teknik Analisis Data	15
1.5.4 Tahapan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 <i>Security Dilemma</i>	17
2.2 <i>Regional Security Complex</i>	22
BAB III GAMBARAN UMUM.....	32
3.1 Agresivitas Tiongkok Melalui Program BRI-nya di Kawasan Indo-Pasifik	32
3.2 Terbentuknya <i>Quadrilateral Security Dialogue (QSD)</i>	43
3.2.1 Quad Terlahir Kembali	45
3.2.2 Pandangan <i>Free and Open Indo-Pacific</i>	48

3.2.3	Quad dan ASEAN	49
3.2.4	Posisi Masing-Masing Anggota QSD terhadap Tiongkok.....	50
3.2	Agenda Keamanan QSD	53
3.2.1	<i>Malabar Naval Exercise</i>	53
3.2.2	<i>Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA)</i>	55
BAB IV PEMBAHASAN.....		57
4.1	Analisis Pembentukan Quad Sebagai Respon Terhadap Agresivitas BRI Tiongkok Pada Kawasan Indo-Pasifik Melalui Agenda Keamanannya	57
4.1.1	Quad Sebagai Respon Terhadap Agresivitas Tiongkok Merupakan <i>Security Dilemma</i>	63
4.1.2	Implementasi Agenda Keamanan Quad sebagai Respon Dilema Keamanan.....	68
4.2	Prospek Masa Depan Quad Terhadap Keamanan Kawasan Indo-Pasifik77	
4.2.1	Peluang dan Tantangan Quad pada Kawasan Indo-Pasifik	82
BAB V PENUTUP		86
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....		88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta <i>nine-dash line</i> Tiongkok	35
Gambar 3.2 Pulau <i>Fiery Cross</i> yang dimiliterisasi Tiongkok	37
Gambar 3.3 Perbedaan Asia-Pasifik dan Indo-Pasifik	40
Gambar 4.1 Perbandingan <i>Asian Supercomplex</i>	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tipe Kompleks Keamanan Kawasan.....	30
Tabel 3.1 Anggaran Keamanan Tiongkok Sejak 2013	39
Tabel 3.2 Perbandingan Anggaran Keamanan Tiongkok dengan 17 Negara Indo-Pasifik.....	40

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual.....	14
-------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang berada pada Samudra Hindia sampai ke Samudra Pasifik dan merupakan salah satu pusat geostrategi maupun geoekonomi dunia. Hamparannya diperdebatkan mulai dari Pantai Timur Afrika hingga Pantai Barat Amerika Serikat, dengan berbagai macam interpretasi dan definisi tergantung pada tiap aktor yang mendefinisikannya. Saling kebergantungan dari kedua samudra tersebut merupakan salah satu bentuk dari globalisasi yang semakin berkembang. Pertukaran barang dan jasa dari berbagai macam aktor di Kawasan Indo-Pasifik telah menipiskan sekat-sekat dari tiap aktor yang ada dan membuka banyak peluang baru bagi negara-negara didalamnya untuk bekerja sama (Das, 2019).

Secara politik, terdapat aktor-aktor yang berperan pada kawasan Indo-Pasifik seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, Australia, Korea Selatan, dan juga negara anggota ASEAN serta negara-negara pesisir yang berada disekitar kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini memiliki kekuatan yang besar secara politik, strategis, dan ekonomi untuk perkembangan tatanan di Asia, terutama diantara dua perkembangan kekuatan besar yang krusial di kawasan ini, yang pertama yaitu perkembangan Tiongkok yang pesat di kawasan Asia-Pasifik dan sekitarnya, yang berhasil memaksa kekuatan lain untuk menyeimbangkan kekuatan mereka di kawasan tersebut. Hal lainnya adalah berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut, sehingga memberikan kesempatan bagi kekuatan lain seperti

Jepang, Australia, dan India untuk memainkan peran mereka agar dapat menjaga stabilitas politik dan mendorong ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik (Ghosh et al., 2022).

Sebagai pusat geoekonomi dan geostrategi, kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat perebutan kekuatan besar. Sebagai contoh, perebutan kekuatan besar ini dapat dilihat pada *Belt and Road Initiative* yang dijalankan oleh Tiongkok. Inisiatif ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Xi Jinping pada saat kunjungan resminya ke Kazakhstan dan Indonesia pada tahun 2013. Inisiatif tersebut dijalankan oleh Tiongkok dalam bentuk pengembangan infrastruktur dan investasi dengan tujuan untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik dari Tiongkok dan menghubungkan Asia Timur dengan Eropa. Proyek ini mengundang kekhawatiran dari negara-negara lainnya khususnya Amerika Serikat dan beberapa negara di Asia karena dianggap sebagai langkah bagi Tiongkok untuk melakukan ekspansi militer dan meningkatkan pengaruhnya secara regional (Mcbride et al., 2023).

Kekhawatiran dari Amerika dan beberapa negara di Asia dapat dipahami melihat agresivitas Tiongkok dengan klaimnya atas Laut Cina Selatan pada tahun 1947. Tiongkok yang saat itu berada dibawah kekuasaan Partai Nasionalis Kuomintang melakukan klaim wilayah pada Laut Cina Selatan yang ditandai dengan *eleven-dash line* pada peta. Klaim ini mengambil sebagian besar dari wilayah tersebut, termasuk Kepulauan Pretas, Kepulauan Paracel, dan Kepulauan Spratly yang didapatkan kembali oleh Tiongkok dari Jepang setelah perang dunia kedua (CFR, 2020). Kemudian pada tahun 1949, ketua dari Partai Komunis Mao Zedong mengumumkan pendirian Republik Rakyat Cina (RRC). Pada tahun 1953,

pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina menghilangkan Teluk Tonkin dan mengubah perbatasan mereka menjadi *nine-dash line* yang kemudian menjadi dasar atas klaim wilayah Tiongkok di Laut Cina Selatan (CFR, 2020).

Kekhawatiran negara-negara yang memiliki kepentingan maupun berada di kawasan Indo-Pasifik terbukti ketika Tiongkok mulai menunjukkan agresivitasnya pada wilayah yang mereka klaim di Laut Cina Selatan. Agresivitas yang dimaksud adalah ketika Tiongkok menggunakan armada besar kapal pengeruk untuk membangun pulau buatan di Laut Cina Selatan (Pasandideh, 2020). Pulau-pulau kecil ini kemudian dimiliterisasi oleh Tiongkok dengan membangun pangkalan-pangkalan militer.

Pandangan yang semakin umum mengenai konstruksi dan militarisasi Tiongkok atas pulau baru dan yang telah ada telah meningkatkan kapabilitas militer mereka di Laut Cina Selatan. Perkembangan tersebut telah memberikan Tiongkok dominasi militer pada wilayah perairan yang bersengketa tersebut (Pasandideh, 2020). Melihat perkembangan tersebut, negara-negara lainnya yang memiliki kepentingan di kawasan Indo-Pasifik tidak tinggal diam dan mulai menerapkan strateginya masing-masing sebagai upaya untuk menngimbangi pengaruh dari Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai contoh kita dapat melihat Jepang yang mendorong pandangan dunia untuk melihat Asia dengan lebih luas lagi sehingga melahirkan konsep Indo-Pasifik, sebagai bentuk yang lebih besar lagi dari Asia-Pasifik dengan bentangan dari Samudra Hindia sampai Samudra Pasifik. Pandangan ini pertama kali diumumkan oleh perdana menteri Shinzo Abe di tahun 2007 pada pidatonya terhadap parlemen india dengan judul "*Confluence of the Two Seas*". Hal ini mengakibatkan perpindahan pusat secara

geografis ke Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan, sehingga menciptakan fokus kepada wilayah dimana Tiongkok memiliki sengketa wilayah dengan beberapa negara. Selain itu, hal tersebut juga memasukkan salah satu negara yang dapat menjadi penyeimbang dari Tiongkok dengan ukurannya saja yaitu India (Lendon & Raine, 2022).

Pandangan Shinzo Abe tentang Indo-Pasifik kemudian melahirkan sebuah forum informal yang disebut sebagai *Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) atau biasa juga disebut sebagai Quad. Forum ini diikuti oleh Jepang, India, Amerika Serikat dan Australia pada tahun yang sama dengan pidato Shinzo Abe yang berjudul “*Confluence of the Two Seas*” (Lendon & Raine, 2022). Kerjasama ini pertama kali muncul sebagai respon terhadap gempa dan tsunami di Samudra Hindia pada tahun 2004. Walaupun bubar dengan cepat, tetapi kelompok ini telah berhasil berkontribusi terhadap bantuan kemanusiaan dunia terhadap bencana yang terjadi pada tahun 2004 melalui kooperasi diplomasi dan operasional yang cepat (Singh, 2022).

Quad bubar karena beberapa faktor, salah satu penyebabnya adalah kritik dari Tiongkok yang mengklaim bahwa kelompok tersebut dibentuk untuk menjadi lawan mereka dan merupakan produk dari strategi pengurangan pada era perang dingin. Pada saat itu, tidak ada satupun dari negara anggota Quad yang ingin menentang Tiongkok secara terbuka dan ingin membentuk hubungan yang konstruktif dengan Tiongkok karena perkembangan domestik dan kalkulasi strategis jangka panjang mereka (Saha, 2022). Setelah bubarnya Quad pertama, Perdana Menteri Shinzo Abe kembali menguraikan pandangannya mengenai “*free and open Indo-Pacific*” pada pidatonya di Kenya pada tahun 2016. Pandangan

Abe mengenai “*free and open Indo-Pacific*” meliputi tiga pilar yaitu: promosi dan pembentukan supremasi hukum, kebebasan navigasi dan perdagangan bebas; serta mencapai kemakmuran ekonomi; dan komitmen atas perdamaian dan stabilitas (Lendon & Raine, 2022).

Pandangan ini sejalan dengan pandangan Amerika Serikat mengenai Indo-Pasifik. Hal ini dapat dilihat pada *U.S Indo-Pacific Strategy* yang dirilis oleh *White House* dimana berdasarkan strategi tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat berkomitmen pada kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, terhubung, makmur, aman, dan kuat. Untuk mencapai hal tersebut, Amerika Serikat akan memperkuat perannya dalam kawasan. Menurut Amerika Serikat juga pendekatan ini tak dapat dicapai sendirian karena untuk merubah keadaan strategis dan tantangan historis diperlukan kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan negara lain yang memiliki pandangan sama tentang kawasan ini (Indo-Pacific Strategy of the United States, 2022).

Dengan pandangan tersebut, Amerika Serikat ingin mencapai lima tujuan di Indo-Pasifik bersama dengan sekutu mereka dan institusi regional yang ada, tujuan tersebut adalah: Menjalankan *free and open Indo-Pacific*, membangun koneksi didalam dan diluar kawasan, mendorong kemakmuran kawasan, memperkuat keamanan Indo-Pasifik, dan membangun ketahanan kawasan atas ancaman transnasional (Indo-Pacific Strategy of the United States, 2022)..

Pandangan *free and open Indo-Pacific* ini yang kemudian membawa kembali topik mengenai Quad bagi negara-negara yang pernah tergabung kedalamnya. Pada *ASEAN Summit* pada 2017 di Manila, keempat negara anggota

kembali memulai negosiasi untuk menghidupkan kembali aliansi quadrilateral yang dulu ada, dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull, Shinzo Abe, Narendra Modi, dan Presiden Donald Trump setuju untuk membangkitkan kembali Quad untuk mendorong perdamaian dan stabilitas pada kawasan Indo-Pasifik, yang terganggu karena perilaku Tiongkok yang asertif (Rai, 2018).

Pada akhirnya Quad kembali muncul dengan tujuan untuk mendukung *free and open Indo-Pacific*. Pada pertemuan pertama Quad setelah bangkit kembali, setiap anggota menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan bersama. Setiap negara anggota memiliki *press release*-nya tersendiri dengan dukungan kolektif untuk tatanan berbasis aturan pada kawasan. Walaupun begitu, terdapat perbedaan dalam pernyataan yang dirilis oleh tiap negara tetapi tetap memiliki agenda yang kurang lebih sama. Agenda tersebut adalah keamanan maritim, infrastruktur berkualitas, respon dan pemulihan atas Covid-19, dan keamanan kawasan dengan menegaskan *ASEAN Centrality* (Saha, 2022).

Bentuk implementasi dari agenda Quad di bidang keamanan dapat dilihat pada *Malabar Naval Exercise* dan *Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness* (IPMDA), dimana *Malabar naval Exercise* yaitu latihan militer angkatan laut yang melibatkan keempat anggotanya. Latihan bersama tersebut menjadi pertama kalinya Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia sebagai Quad berpartisipasi dalam latihan militer bersama. Keempat negara demokrasi tersebut berharap latihan tersebut dapat menjadi penyeimbang dari kekuatan militer dan pengaruh politik Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik (Pal, 2020). Sedangkan IPMDA merupakan inisiatif teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran domain maritim pada kawasan Indo-Pasifik. IPMDA

sendiri memanfaatkan teknologi inovatif seperti pengumpulan data frekuensi radio satelit komersial untuk menyediakan sekutu di seluruh Asia Tenggara, wilayah Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik dengan informasi yang hampir *real time* tentang aktifitas yang terjadi pada wilayah maritim mereka sebagai bentuk penerapan dari pandangan *free and open Indo-Pacific* (The White House, 2022).

Dengan terlahir kembalinya Quad sebagai salah satu kekuatan di Indo-Pasifik maka Tiongkok tidak lagi menjadi kekuatan besar yang paling berpengaruh satu-satunya di Kawasan Indo-Pasifik. Munculnya Quad menjadi tantangan bagi Tiongkok untuk memperbesar pengaruhnya di kawasan kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan analisis mengenai pembentukan *Quadruple Security Dialogue* (QSD) atau disebut juga Quad sebagai respon atas *Belt and Road Initiative* Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik berdasarkan agenda keamanan Quad yaitu keamanan maritim dan keamanan kawasan yang menegaskan *ASEAN Centrality*. Peneliti menganalisis mengenai bentuk-bentuk ancaman Tiongkok terhadap kawasan dan bagaimana Quad dapat terbentuk dan melakukan penyeimbangan kekuatan serta pengaruhnya di Kawasan Indo-Pasifik terhadap ancaman tersebut menggunakan teori *security dilemma* dan *regional security complex theory* untuk membantu menjelaskan mengenai pembentukan Quad dan agenda keamanannya sebagai respon atas proyek *Belt and Road Initiative* Tiongkok.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus kepada analisis pembentukan Quad dengan implementasi agenda keamanannya dari tahun 2017 sampai 2022 untuk Kawasan Indo-Pasifik dengan pandangan *Free and Open Indo-Pacific* dari keempat negara

anggota Quad sebagai respon atas *Belt and Road Initiative* Tiongkok dan ancamannya pada kawasan. Dengan batasan masalah tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang pembentukan Quad sebagai respon atas agresivitas BRI Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik melalui implementasi agenda keamanannya?
2. Bagaimana prospek masa depan Quad terhadap keamanan regional kawasan Indo-Pasifik?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tuliskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pembentukan Quad sebagai respon atas agresivitas BRI Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik melalui agenda keamanannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana prospek masa depan Quad terhadap keamanan regional kawasan Indo-Pasifik.

Dengan tujuan penelitian tersebut, maka peneliti berharap penelitian ini bermanfaat terhadap:

1. Salah satu bentuk kontribusi untuk ilmu hubungan internasional terutama di bidang keamanan dan Kawasan Indo-Pasifik.
2. Sebagai referensi kedepannya untuk studi mengenai Quad, BRI Tiongkok, dan Kawasan Indo-Pasifik.

1.4 Kerangka Konseptual

Peneliti akan menggunakan dua teori untuk menganalisis mengenai alasan Quad dapat terbentuk sebagai respon atas BRI Tiongkok. Teori yang akan peneliti gunakan adalah *security dilemma* dan *regional security complex theory*. Teori *security dilemma* akan membantu peneliti menganalisis tentang pembentukan Quad dengan agenda keamanannya yang memiliki pandangan *free and open Indo-Pacific* sebagai respon terhadap BRI Tiongkok. Teori *regional security complex* akan menjelaskan mengenai bagaimana prospek Quad kedepannya sebagai kekuatan yang ingin menantang pengaruh BRI Tiongkok pada kawasan dan apa dampaknya terhadap keamanan regional di kawasan Indo-Pasifik.

1.4.1 Security Dilemma

Teori *security dilemma* merupakan salah satu teori dalam kajian studi keamanan internasional. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Herz pada karyanya yang berjudul "*Idealist Internationalism and the Security Dilemma*" pada tahun 1950. Teori *security dilemma* menjelaskan mengenai dinamika penyebab pecahnya perang dan pemeliharaan perdamaian. Konsep ini telah digunakan untuk menjelaskan beberapa peristiwa besar dunia seperti perang dunia pertama dan awal mula dan berakhirnya perang dingin (Tang, 2009).

Pemikiran utama dari teori ini adalah tentang upaya suatu negara yang berusaha untuk meningkatkan keamanan nasionalnya dapat menyebabkan rasa tidak aman bagi negara lain dan dianggap sebagai tindakan ofensif sehingga mereka berusaha untuk mengimbangnya dan menyebabkan suatu dilema yang berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat. John Herz mengelaborasi pendapatnya bahwa "suatu grup maupun individu yang hidup berdampingan satu

sama lain tanpa diatur untuk mencapai kesatuan yang lebih tinggi ... harus untuk ... khawatir terhadap keamanan mereka dari kemungkinan untuk diserang, didominasi, atau dimusnahkan oleh grup atau individu lainnya. Sebagai upaya untuk mendapatkan keamanan dari serangan tersebut mereka didorong untuk meningkatkan kekuatannya untuk menghindari dampak dari kekuatan grup atau individu lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakamanan bagi pihak lainnya dan memaksa mereka untuk bersiap untuk hal terburuk. Karena tak ada negara yang akan merasa aman sepenuhnya di dunia yang saling berkompetisi sehingga persaingan kekuatanpun terjadi dan lingkaran setan dari keamanan dan kekuatan terjadi” (Tang, 2009).

Menurut Herz, terdapat enam aspek dalam *security dilemma* yaitu:(1) sumber utama dari dilema keamanan adalah anarki, (2) penyebab langsung dilema keamanan adalah ketidakpastian dan ketakutan negara atas niat negara lain untuk menyakiti dibawah anarki, (3) Cara negara untuk melindungi dirinya sendiri untuk terhindar dari dilema keamanan adalah dengan meningkatkan kekuatannya sehingga menghasilkan lingkaran kompetisi kekuatan, (4) percobaan suatu negara untuk terhindar dari dilema keamanan dengan meningkatkan kekuatannya malah tak meningkatkan keamanan mereka, (5) dilema keamanan dapat menyebabkan perang, tetapi bukan merupakan penyebab seluruh peperangan, (6) dinamika dari dilema keamanan adalah “lingkaran setan” penguatan diri mereka (Tang, 2009)

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menggunakan konsep ini untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai alasan terbentuknya Quad sebagai respon atas dilema keamanan yang terjadi akibat ancaman-ancaman keamanan dari proyek BRI Tiongkok dan implikasinya terhadap keamanan kawasan melalui

pembangunan dan militerisasi pada pulau-pulau yang dipersengketakan pada Kawasan Indo-Pasifik khususnya pada Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Peneliti menggunakan keenam aspek *security dilemma* menurut John Herz untuk menjawab pertanyaan penelitian. Aspek pertama akan menjelaskan mengenai bagaimana dilema keamanan yang terjadi pada Kawasan Indo-Pasifik dan terbentuknya Quad sebagai respon atas agresivitas Tiongkok dapat terjadi karena anarki pada kawasan, yaitu sebuah keadaan dimana tidak terdapat otoritas atau pemerintahan yang dapat menegakkan peraturan atau menyelesaikan sengketa antar-negara. Aspek kedua menjelaskan mengenai penyebab dari dilema keamanan pada Kawasan Indo-Pasifik yang diakibatkan oleh agresivitas Tiongkok dan terbentuknya Quad merupakan bentuk ketakutan dan ketidakpastian negara untuk menyakiti dibawah anarki. Aspek ketiga menjelaskan mengenai bagaimana peningkatan kekuatan Tiongkok dan Quad untuk melindungi diri serta kepentingannya pada kawasan menghasilkan lingkaran kompetensi kekuatan. Aspek keempat menjelaskan tentang upaya Quad melalui agenda keamanannya dan Tiongkok untuk meningkatkan kekuatannya malah menyebabkan ketidakamanan pada kawasan dan tidak meningkatkan keamanan mereka. Kemudian aspek kelima akan menjelaskan mengenai dilema keamanan yang menjadi penyebab perang, tetapi bukanlah merupakan penyebab seluruh peperangan. Serta aspek terakhir akan menjelaskan tentang dinamika dilema keamaann yang merupakan lingkaran setan penguatan diri kedua aktor tersebut.

1.4.2 *Regional Security Complex Theory*

Regional Security Complex Theory (RSCT) merupakan sebuah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Barry Buzan pada bukunya *People, States and*

Fear (1983). Teori ini membahas mengenai level analisis yang terletak pada unit individual dan sistem internasional secara keseluruhan. Teori ini menjelaskan mengenai keberadaan dari sub-sistem regional sebagai objek dari analisis keamanan, dan memberikan kerangka analisis untuk menghadapinya. Teori ini juga berfokus pada negara sebagai unit dan pada sektor militer dan politik sebagai forum utama untuk hubungan keamanan (Buzan and Weaver, 2003).

Pola normal dari interdependensi keamanan dalam sistem internasional yang anarkis dan beragam secara geografis dibagi kedalam klaster kawasan, kawasan inilah yang kemudian disebut sebagai *regional security complex* (RSC) (Buzan, 2003). Interdependensi keamanan lebih intens terjadi pada negara yang berada dalam RSC tersebut daripada dengan negara diluar dari RSC. Hal ini lah yang kemudian menjadikan hubungan keamanan antar-negara yang terdapat pada RSC memiliki pola beragam yang terbentuk berdasarkan distribusi kekuasaan dan hubungan sejarah yang berdasar pada *amity* (Persahabatan) maupun *enmity* (Permusuhan) (Buzan, 2003).

Awal mula dari teori RSC ini berasal dari konsep *security complex* yang dikembangkan oleh Buzan, Weaver, dan Wilde pada bukunya yang berjudul *Security, a New Framework for Analysis* pada tahun 1998. Mereka mendefinisikan *security complex* sebagai “*a set of units whose major processes of securitization, desecuritization, or both, are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analyzed or resolved apart from one another* (Buzan et al., 1998: 201)”.

Sedikit berbeda dengan definisi awal mereka yang menyebut “*a group of state...*”. Hal ini disebabkan oleh pemikiran mereka yang memperhitungkan

metode konstruktifisme dan menghindari asumsi yang berpusat pada negara sebagai aktor dan hanya memiliki subjek militer dan politik. Tak dapat dipungkiri bahwa organisasi regional, forum regional, dan aktor lainnya dapat menjadi unit baru yang mempengaruhi RSC dan sektor-sektor lainnya seperti lingkungan dan sosial juga menjadi subjek baru yang dapat memengaruhi kawasan dan keamanannya.

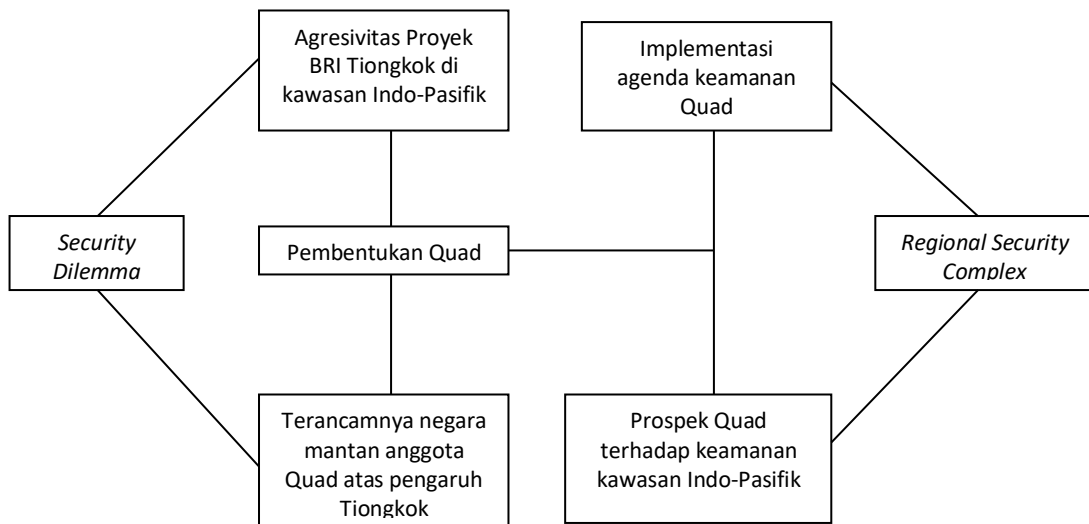
Buzan pada bukunya yang berjudul *People, States and Fear* (1991) memaparkan bahwa terdapat empat level analisis untuk analisis keamanan, yaitu:

1. Domestik, pada level ini yang menjadi fokus analisis adalah negara, baik itu negara yang kuat maupun lemah. Isu yang dianalisis pada level ini adalah tingkat persatuan dari sosial politiknya dan kekerasan politik domestiknya.
2. Regional, fokus analisis pada level ini adalah *regional security complex* dengan isu interdependensi keamanan, *amity/enmity*, polaritas, *subcomplexes*.
3. Inter-Regional, berfokus pada isu hubungan yang lintas batas atau hubungan antar kawasan.
4. Global, fokus analisisnya berfokus pada tingkat yang lebih tinggi lagi dan *global security complex* dengan isu kekuatan negara adidaya dan pengaruhnya terhadap keamanan kawasan.

Berdasarkan level analisis yang telah dipaparkan diatas, peneliti akan menggunakan level analisis regional dan inter-regional untuk menganalisis mengenai pembentukan Quad sebagai respon terhadap BRI Tiongkok. Level analisis ini akan menjelaskan mengenai hubungan *amity* (persahabatan) dan

enmity (permusuhan) dari negara-negara yang berada di kawasan sehingga dapat melihat penyebab dari pembentukan Quad. Selain itu, konsep ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana prospek masa depan Quad dan pengaruhnya terhadap keamanan kawasan khususnya terhadap negara-negara sekitarnya. Hal ini sesuai dengan dengan asumsi dasar dari teori *regional security complex* yang beranggapan bahwa negara yang berada dalam satu kawasan memiliki interdependensi keamanan terutama bagi negara-negara yang memiliki jarak berdekatan (Buzan, 2003).

1.4.3 Model Analisis



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang masalah yang terjadi di dunia nyata atas suatu fenomena sosial dan memiliki jawaban yang tak dapat dijelaskan dalam bentuk angka serta berfokus pada pertanyaan mengenai “bagaimana” dan “mengapa”(Tenny et al.,

2022). Dengan jenis penelitian kualitatif maka peneliti akan menganalisis mengenai Analisis pembentukan Quad sebagai respon terhadap BRI Tiongkok menggunakan dua teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat, membaca, dan mengolah serta mengumpulkan data mengenai Quad dan *belt and road initiative* Tiongkok dari berbagai sumber yang relevan untuk penelitian. Untuk jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari laporan resmi pemerintah, pernyataan resmi pemerintah, dan dokumen lainnya yang bisa dapat didapatkan melalui situs resmi pemerintah seperti whitehouse.gov, www.japan.go.jp, australia.gov.au dan lain sebagainya. Untuk data sekunder akan dikumpulkan dari buku, jurnal, dokumen, serta artikel dan situs berita yang kredibel seperti the diplomat, CNN, Council on Foreign Relation, BBC, dan lain sebagainya.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data eksplanatif. Metode analisis eksplanatif merupakan bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan penyebab yang mendasar dan hubungan antar variabel yang berbeda. Metode ini berusaha untuk menjelaskan mengenai mengapa suatu fenomena dapat terjadi dan bagaimana hal tersebut dapat berhubungan dengan hal lainnya (Hassan, 2022). Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan menjelaskan mengenai pembentukan Quad dipengaruhi oleh proyek BRI Tiongkok dengan sikap agresifnya di kawasan Indo-Pasifik.

1.5.4 Tahapan Penelitian

- 1 Memahami ide utama dari penelitian
- 2 Mengumpulkan informasi dan bahan bacaan yang relevan mengenai pembentukan Quad sebagai respon atas BRI Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik
- 3 Membuat spesifikasi pada fokus penelitian dan mengelompokkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian.
- 4 Menganalisis data yang terkumpul menggunakan teori *security dilemma* dan *regional security complex*
- 5 Membuat kesimpulan penelitian berdasarkan bahan dan data yang telah dianalisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Security Dilemma*

Dilema keamanan merupakan sebuah keadaan dimana satu negara meningkatkan pertahanannya untuk mencapai keamanan dengan tingkat yang lebih tinggi lagi, Akan tetapi, hal ini dilihat oleh negara lain sebagai tindakan agresi dan akan dibalas dengan langkah-langkah keamanan dari negara lainnya (Diez, Bode, & Costa, 2011). Teori dilema keamanan adalah salah satu ide teoritis yang paling penting dalam ilmu hubungan internasional. Bertahun-tahun semenjak Herbert Butterfield, John Herz, dan Robert Jarvis pertama kali mengembangkannya, konsep ini telah berkembang dan digunakan untuk menjawab banyak pertanyaan penting mengenai teori ilmu hubungan internasional dan kebijakan keamanan. Teori dilema keamanan dapat dibidang sebagai kunci utama dari *defensive realism*, karena menurut *defensive realists*, dilema keamananlah yang memungkinkan kerjasama sejati diantara negara dan melebihi aliansi yang hanya sekilas dalam menghadapi musuh bersama. Teori *security dilemma* menjelaskan mengenai dinamika penyebab pecahnya perang dan pemeliharaan perdamaian. Konsep ini telah digunakan untuk menjelaskan beberapa peristiwa besar dunia seperti perang dunia pertama dan awal mula dan berakhirnya perang dingin (Tang, 2009).

Konsep dilema keamanan merupakan sebuah konsep yang relevan pada saat kita berbicara mengenai rasa takut, kerjasama dan rasa percaya pada abad ke-21. Rasa takut merupakan emosi dasar yang dapat membentuk dilema keamanan telah diabaikan dengan buruk dalam ruang lingkup hubungan internasional. Rasa takut

membentuk argumen dilema keamanan dari Herz. Menurut Herz (1951, dikutip dalam Booth & Wheeler, 2008), karena manusia memiliki kemampuan untuk memberikan rasa sakit dan kematian terhadap satu sama lainnya, hal ini menciptakan rasa saling curiga dan saling dilema, yaitu dilema “membunuh atau mati”, yaitu menyerang duluan atau menanggung risiko kehancuran.

Konsep mengenai dilema keamanan pertama kali dijelaskan oleh Herbert Butterfield pada tahun 1949 dan kemudian istilahnya diciptakan oleh John Herz pada tahun 1950. Walaupun konsep ini dilihat cocok dengan kompetisi kekuatan antar Amerika Serikat dan Uni Soviet pada perang dingin, pendukung teori ini tidak melihat konsep ini hanya terkait pada satu era sejarah saja. Lebih tepatnya konsep ini mencerminkan sifat dasar kehidupan internasional yang tragis dimana aktor negara menginginkan perdamaian dan stabilitas tetapi berakhir dengan konflik militer. Dengan demikian, walaupun setiap negara menginginkan perdamaian dan keamanan, perang tetap dapat terjadi, karena rasa takut dan ketidakamanan yang berasal dari struktur anarki dari sistem internasional (Wivel, 2011).

Konsep dilema keamanan sendiri merupakan istilah klasik dalam teori realisme ilmu hubungan internasional yang digunakan untuk menjelaskan mengenai perilaku dari negara-negara dalam sistem internasional yang anarki dan menjadi istilah yang standar dalam pembahasan mengenai keamanan internasional (Bluth, 2011). John Herz dalam jurnalnya yang berjudul “*Idealist Internationalism and the Security Dilemma*” mengatakan bahwa dilema keamanan adalah:

“There has arisen what may be called the "security dilemma" of men, or groups, or their leaders. Groups or individuals living in such a constellation must be, and usually are, concerned about their security from being attacked, subjected, dominated, or annihilated by other groups and individuals. Striving to attain security from such attack, they are driven to acquire more and more power in order to escape the impact of the power of others. This, in turn, renders the others more insecure and compels them to prepare for the worst. Since none can ever feel entirely secure in such a world of competing units, power competition ensues, and the vicious cycle of security and power accumulation is on” (Herz, 1950).

Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa dilema keamanan adalah suatu keadaan dimana upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sebagai langkah untuk mengatasi kemungkinan mereka akan diserang, didominasi, dan dimusnahkan menimbulkan rasa tak aman bagi negara lain, sehingga mendorong negara lain untuk mengimbangi peningkatan kekuatan tersebut dan bersiap untuk kemungkinan mereka untuk diserang. Dikarenakan tak ada negara yang akan merasa aman sepenuhnya maka dilema keamananpun terjadi akibat dari peningkatan persenjataan dari negara-negara yang merasa tak aman dan menimbulkan *arms race*.

Terdapat enam aspek dilema keamanan menurut John Herz yaitu: (1) sumber utama dari dilema keamanan adalah anarki, (2) penyebab langsung dilema keamanan adalah ketidakpastian dan ketakutan negara atas niat negara lain untuk menyakiti dibawah anarki, (3) Cara negara untuk melindungi dirinya sendiri untuk terhindar dari dilema keamanan adalah dengan meningkatkan kekuatannya sehingga menghasilkan lingkaran kompetisi kekuatan, (4) percobaan suatu negara untuk terhindar dari dilema keamanan dengan meningkatkan kekuatannya malah tak meningkatkan keamanan mereka, (5) dilema keamanan dapat menyebabkan

perang, tetapi bukan merupakan penyebab seluruh peperangan, (6) dinamika dari dilema keamanan adalah “lingkaran setan” penguatan diri mereka (Tang, 2009).

Pendapat lain mengenai dilema keamanan datang dari Herbert Butterfield yang berpendapat bahwa dilema keamanan dapat mendorong negara untuk berperang walaupun mereka bisa saja tak ingin untuk membahayakan satu sama lain. Dia mengatakan bahwa:

“The greatest war in history can be produced without the intervention of any great criminals who might be out to do deliberate harm in the world. It could be produced between two powers, both of which were desperately anxious to avoid a conflict of any sort” (Butterfield, 1951; Tang, 2009).

Herbert Butterfield membagi dilema keamanan menjadi enam aspek yaitu (1) sumber utama dari dilema keamanan adalah rasa takut, yang berasal dari “dosa universal umat manusia”; (2) ketidakpastian atas niat negara lainnya; (3) pada dasarnya merupakan ketidaksengajaan; (4) menyebabkan hasil yang tragis; (5) diperburuk oleh faktor psikologis; (6) merupakan penyebab utama dari seluruh konflik manusia (Tang, 2009).

Selain Herbert Butterfield dan John Herz, penulis lainnya yang berkontribusi banyak terhadap teori dilema keamanan adalah Robert Jervis, dia menekankan aspek lain dalam dilema keamanan dengan beberapa pernyataan seperti “inti dari argumen mengenai dilema keamanan adalah peningkatan keamanan dari salah satu negara dapat membuat yang lain menjadi tidak lebih aman bukan karena perbedaan pandangan ataupun permusuhan, tetapi terjadi karena hubungan internasional yang anarki”; “walaupun mereka dapat dengan yakin bahwa niat negara pada saat ini tidak berbahaya, mereka tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa negara lain akan menjadi agresif dimasa depan

juga tidak dapat menjamin bahwa mereka sendiri dapat tetap damai.”; dan pernyataan terakhir yaitu “ketika menentukan... dilema keamanan yang sebenarnya, kita harus mempertimbangkan apakah tindakan mereka itu murni hanya untuk pertahanan diri” (Tang, 2009).

Jervis mengelaborasi tujuh aspek dilema keamanan yaitu: (1) dilema keamanan pada dasarnya bersifat struktural (2) ketidakpastian negara dan rasa takut tentang niat satu sama lain pada masa sekarang maupun masa depan sangatlah krusial untuk membentuk dan mempertahankan dilema keamanan; (3) hal ini terjadi karena tindakan pertahanan, sehingga terjadi secara tak sengaja; (4) cenderung untuk menghasilkan hal yang tidak diinginkan dan merugikan diri sendiri, yaitu mengurangi keamanan negara sendiri; (5) cenderung menyebabkan hasil yang tragis yaitu perang; (6) dilema keamanan dapat menyebabkan perang, tetapi bukan menjadi penyebab seluruh peperangan; (7) dinamika dari dilema keamanan adalah memperkuat diri sendiri dan berbentuk spiral (Tang, 2009).

Pada akhirnya, selain mempersembahkan ketujuh aspek dilema keamanan, Jervis juga memberikan kontribusi mendasar seperti: tingkat keparahan dari dilema keamanan dapat diatur pada faktor fisik atau material seperti teknologi dan geografi dan juga faktor psikologis dan perseptual seperti kesalahan persepsi (Tang, 2009).

Dengan beberapa definisi dilema keamanan diatas, peneliti menemukan kecocokan dengan tema yang diangkat oleh peneliti mengenai pembentukan *Quadruple Security Dialogue* (QSD) sebagai respon atas program BRI Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, dimana Tiongkok yang bersikap agresif di kawasan dengan melakukan militerisasi pada pulau-pulau yang mereka klaim di Laut Cina

Selatan seperti pada kepulauan Paracel dan Spratly lalu kemudian mereka membangun peralatan militer pada pulau tersebut karena ingin mengamankan pengaruh mereka pada kawasan Indo-Pasifik, tetapi menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara lainnya yang berada pada kawasan sehingga mereka berusaha untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok pada kawasan.

Salah satu bentuk dari usaha negara-negara lain pada kawasan untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok dengan program BRI-nya dapat dilihat pada Quad yang kembali terbentuk pada tahun 2017 dengan pandangan *free and open Indo-Pacific* dan agenda keamanannya pada kawasan yang diimplementasikan dengan cara latihan militer bersama dengan keempat negara anggotanya yang disebut juga dengan *Malabar Naval Exercise*, dan juga *Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness* (IPMDA). Oleh karena itu, Peneliti akan menggunakan teori ini untuk membantu menganalisis mengenai dilema keamanan yang terjadi pada kawasan dan akan menggunakan definisi dan aspek dilema keamanan menurut John Herz pada penelitian ini karena menurut peneliti merupakan definisi yang paling relevan dengan *status quo* pada saat penelitian ini dilaksanakan.

2.2 *Regional Security Complex*

Sejarah dari *regional security complexes* (RSCs) dibagi menjadi tiga tahap yaitu: era modern dari tahun 1500 sampai 1945; Masa perang dingin dan dekolonisasi dari tahun 1945 sampai 1989; dan masa pasca perang dingin dari 1990 sampai sekarang. Dalam setengah milenium ini, sistem internasional skala global pertama kali terbentuk dan negara teritorial yang berdaulat ala Eropa menjadi bentuk politik yang dominan.

kedua perkembangan tersebut memberikan kerangka penting untuk terbentuknya RSCs: negara menjadi pemain utama dalam bidang keamanan, dan ketika sistem internasional mencapai skala global, ruang tercipta dimana subsistem keamanan regional yang berbeda dapat muncul. Terdapat beberapa negara yang berada pada puncak kekuatan global memperlakukan satu sama lain sebagai kelas yang khusus, dan memproyeksikan kekuatan mereka sampai wilayah yang jauh. Tetapi bagi kebanyakan negara, keamanan mereka ditentukan oleh tetangga dekat mereka (Buzan & Weaver, 2003).

Sebelum tahun 1500, dinamika keamanan premodern terbentuk dari beberapa sistem yang secara relatif terpisah, tetapi tidak berbentuk regional karena tingkat global belum sekuat itu untuk membentuk sistem global dunia. Pada era modern dari 1500 sampai 1945, sistem internasional ala Eropa meluas sampai pada tingkat global. Negara nasional Eropa yang baru ini menjangkau secara ekonomi, politik, dan militer, sehingga membentuk kerajaan formal maupun informal diseluruh dunia. Terkadang proyeksi kekuatan dari Eropa menghancurkan dan menenyapkan sebagian besar dari masyarakat adat dan sistem politik mereka, sebagai contoh seperti yang terjadi pada Amerika dan Australia (Buzan & Weaver, 2003).

Pada tahap kedua yaitu pada tahun 1945 sampai 1989, perang dingin dan dekolonisasi menciptakan pengaruh yang kontradiksi. Pada satu sisi, arus dekolonisasi meruntuhkan kekuasaan kerajaan, membentuk banyak negara baru, dan memungkinkan dinamika keamanan regional untuk mulai beroperasi diantara aktor baru yang independen ini pada kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Di sisi lain, persaingan *bipolar* dari Amerika Serikat dan Uni

Soviet berhasil membuat sebagian besar dari Eropa dan Asia Timur menjadi bawahannya, dan menembus pada sebagian besar dari kawasan yang baru dibebaskan tersebut. Kedua kekuatan adidaya yang mendominasi politik dunia setelah 1945 memiliki ideologi yang sangat berbeda dibanding Eropa dan Kekaisaran Jepang. Uni Soviet melihat mereka sebagai perpanjangan dari kapitalisme dan menargetkan mereka untuk revolusi sosialis. Amerika melihat mereka sebagai perpanjangan dari merkantilisme Eropa, dan menginginkan agar mereka membuka diri terhadap pasar bebas dan penentuan nasib sendiri. Kedua negara adidaya ini dengan cepat melihat negara dunia ketiga sebagai arena yang penting untuk persaingan militer dan ideologi mereka. Perang dingin membantu pembentukan dari beberapa RSCs di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Tetapi juga menjadi mekanisme yang mengatur dan mendorong intervensi yang luas kedalam operasi dari RSCs baru tersebut (Buzan & Weaver, 2003).

Dekolonisasi dari perang dingin berlangsung secara sangat tidak merata, di beberapa tempat, khususnya Asia Selatan pada tahun 1947 sampai 1948, semua negara utama dalam satu kawasan terdekolonisasi secara bersamaan, dan membuat transisi dari subordinasi kekaisaran menjadi RSC yang otonom dalam satu langkah yang cepat. Dampak dari perang dingin terhadap proses munculnya dinamika keamanan regional menyebar dan akhir dari perang dingin menjadi tanda tahap ketiga dari RSC, yaitu periode setelah 1990. Akhir dari perang dingin menghasilkan tiga dampak besar pada keamanan regional. Yang pertama adalah menghilangkan pengaruh dari negara adidaya terhadap Eropa, dan mengubah secara mendasar bentuk dari penetrasi negara adidaya di Asia Timur. serta dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1991, menghasilkan lima belas negara baru

dan RSC baru. Dampak yang kedua adalah, dengan menghilangkan konfrontasi ideologi dan Uni Soviet, terjadi perubahan yang besar pada penetrasi kekuatan global kepada RSCs dunia ketiga. Hal ini bisa baik dan bisa juga buruk. Dinamika tingkat keamanan regional juga tampaknya mendapatkan lebih banyak otonomi dalam operasionalnya daripada sebelumnya karena meningkatnya pengabaian dari kekuatan global pada mereka. hal ini mengakibatkan *core* (pusat) berada pada posisi yang lebih dominan secara ideologi dan ekonomi dari *periphery* (pinggiran) daripada pada masa perang dingin. Dampak yang ketiga adalah, berakhirnya perang dingin menghasilkan perubahan dari agenda keamanan mencakup berbagai isu dan aktor non-militer, yang telah terlihat sejak tahun 1970-an (Buzan & Weaver, 2003).

Tahap terakhir yaitu pasca perang dingin, dimana terdapat beberapa interpretasi pada tahap ini. Salah satu interpretasinya berasal dari pandangan neorealist yang memiliki persetujuan umum bahwa struktur pasca perang dingin berbentuk unipolar. Bagaimana unipolar ini dipahami masih diperdebatkan (Kapstein & Mastanduno, 1999; Buzan & Weaver 2003). Untuk versi kuat dari unipolar ini melihat hegemoni dari Amerika Serikat sejalan dengan analisis globalis dalam hal mendukung dominasi dari tingkat sistem. Versi lemah dari unipolar melihat dari sudut pandang regionalis bahwa akhir dari perang dingin menciptakan lebih banyak otonomi untuk dinamika keamanan tingkat regional (Buzan & Weaver, 2003).

Interpretasi lainnya tentang dunia pasca perang dingin adalah bahwa sistem internasional itu terbagi kedalam dua dunia yaitu zona perdamaian dan zona konflik (Buzan 1991a: 432; Goldgeier & McFaul 1992; Singer & Wildavsky

1993; Deutsch et al. 1957; Keohane and Nye 1977; dikutip dalam Buzan & Weaver, 2003). Pada interpretasi ini, zona perdamaian lebih berfokus kepada negara barat dan sekutu terdekatnya sebagai inti dari politik ekonomi global, mereka mengalami perubahan dari kekhawatiran keamanan militer berat menjadi kekhawatiran yang lebih luas, beragam dan kebanyakan mengenai keamanan non-militer. Untuk yang berada pada zona konflik perubahan yang terjadi tak begitu terlihat, ancaman militer masih menjadi hal yang biasa dan kebanyakan dari mereka berdebat mengenai keamanan ekonomi dan ‘tatanan ekonomi internasional baru’, sejak tahun-tahun awal dekolonisasi. Apapun interpretasinya, era pasca perang dingin secara jelas membuka ruang lingkup dinamika keamanan regional dengan dekolonisasi. Dekolonisasi membuka ruang untuk dinamika militer-politik regional, dan akhir dari perang dingin memungkinkan dinamika ini untuk bergerak dengan lebih bebas dari gangguan militer-politik tingkat tinggi dari negara adidaya (Buzan & Weaver, 2003).

Setelah terjadinya dekolonisasi pada era pasca perang dingin, keamanan pada tingkat kawasan menjadi lebih otonom dan menonjol pada politik internasional, dan berakhirnya perang dingin mempercepat proses ini (Katzenstein, 2000; Buzan & Weaver, 2003). Tanpa adanya persaingan antar negara adidaya yang mempengaruhi seluruh kawasan, kekuatan lokal memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver (Buzan & Weaver, 2003). Satu dekade setelah berakhirnya perang dingin, negara adidaya yang tersisa dan kekuatan besar lainnya seperti Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, Russia, dan lain sebagainya memiliki dorongan yang lebih kecil dan menunjukkan ketidakinginan mereka untuk terlalu ikut campur dalam urusan keamanan diluar dari kawasan mereka.

Otonomi yang relatif dari keamanan kawasan menghasilkan pola hubungan keamanan internasional yang berbeda secara mendasar dari struktur yang kaku dari *bipolarity* adidaya yang terjadi pada masa perang dingin. Pola ini tidak dapat dibidang sebagai '*unipolar*' maupun '*multipolar*' dalam struktur sistem internasional dan tidaklah juga dapat dijelaskan sebagai bentuk globalisasi dan kesimpulan terbaik yang dapat dijelaskan dalam ilmu hubungan internasional untuk menjelaskan konsep tatanan keamanan pada masa pasca perang dingin adalah dengan menyebutnya sebagai '*the new world disorder*' (Carpenter, 1991; Buzan & Weaver, 2003).

Regional Security Complex Theory (RSCT) merupakan sebuah teori keamanan internasional yang pertama kali muncul pada tahun 1990-an dan dikembangkan oleh beberapa penulis seperti Barry Buzan, Jeep de Wilde, dan Ole Weaver. Teori ini berakar dari Mazhab Kopenhagen (*Copenhagen School*) yang merupakan salah satu aliran dalam studi ilmu hubungan internasional yang memiliki pusat perhatian dibidang keamanan (Bakry, 2017). Teori ini memungkinkan kita untuk memahami tentang struktur baru dan untuk mengevaluasi keseimbangan kekuatan yang relatif, dan hubungan timbal balik yang ada didalamnya antara tren regionalisasi dan globalisasi (Buzan & Weaver, 2003). Teori ini membedakan antara interaksi tingkat sistem dari kekuatan global, yang memiliki kapabilitas yang memungkinkan mereka untuk melampaui jarak, dan interaksi tingkat sub-sistem dari kekuatan yang lebih kecil yang lingkungan utama keamanannya adalah wilayah lokal mereka sendiri. Pemikiran utama dari RSCT adalah, karena sebagian besar ancaman lebih mudah berpindah pada jarak yang lebih dekat daripada jarak jauh, interdependensi keamanan biasanya

memiliki pola yang terkelompokkan menjadi klaster yang berbasis regional yaitu *security complexes* (Buzan & Weaver, 2003).

RSCT menggunakan gabungan dari pendekatan materialis dan konstruktivis. Dimana pada pendekatan materialis, teori ini menggunakan konsep teritorial yang terbatas dan distribusi kekuasaan yang mirip dengan *neorealisme*. Penekanannya pada tingkat regional cocok dan saling melengkapi dengan skema struktural dari *neorealisme*, tetapi berkontradiksi dengan kecenderungan dari kebanyakan analisis *neorealis* yang berfokus pada struktur tingkat global. Pada pendekatan konstruktivis, RSCT dibentuk dari teori sekuritisasi yang telah dijelaskan pada karya Buzan, Weaver, dan Wilde yang berjudul “*Security : A New Framework for Analysis*” yang berfokus pada proses politik dimana isu-isu keamanan dibentuk. Dengan demikian, RSCT melepaskan diri dari *neorealisme* dengan menganggap distribusi kekuasaan dan pola *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan) sebagai variabel independen (Buzan & Weaver, 2003). RSCT memberikan kerangka konseptual yang mengklasifikasikan wilayah keamanan menjadi beberapa jenis, dan memberikan dasar untuk studi banding mengenai keamanan kawasan. RSCT juga menawarkan teori dengan kekuatan untuk memprediksi, dalam artian bisa mempersempit kemungkinan yang terjadi untuk wilayah tertentu (Buzan & Weaver, 2003).

Buzan, Weaver, dan Wilde mendefinisikan *security complex* sebagai “*a set of units whose major processes of securitization, desecuritization, or both, are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analyzed or resolved apart from one another* (Buzan et al., 1998: 201)”. Sedikit berbeda dengan definisi awal mereka yang menyebut ‘*a group of states whose primary*

security concerns link together sufficiently closely that their national securities cannot reasonably be considered apart from one another (Buzan, 1991)'. Hal ini disebabkan oleh pemikiran mereka yang memperhitungkan metode konstruktifisme dan menghindari asumsi yang berpusat pada negara sebagai aktor dan hanya memiliki subjek militer dan politik. Tak dapat dipungkiri bahwa organisasi regional, forum regional, dan aktor lainnya dapat menjadi unit baru yang mempengaruhi RSC dan sektor-sektor lainnya seperti lingkungan dan sosial juga menjadi subjek baru yang dapat memengaruhi kawasan dan keamanannya. Terdapat empat variabel yang membentuk struktur penting dari *regional security complex* yaitu:

1. Perbatasan, hal ini yang menjadi pembeda dengan RSC lainnya
2. Struktur Anarki, yang berarti bahwa RSC harus terdiri dari dua atau lebih unit yang otonom
3. Polaritas, yang menjelaskan distribusi kekuatan diantara unit-unit didalamnya
4. Konstruksi Sosial, yang menjelaskan tentang pola *amity* dan *enmity* diantara unit-unit didalamnya

Berikut beberapa tipe kompleks keamanan kawasan menurut Barry Buzan:

Tabel 2.1 Tipe Kompleks Keamanan Kawasan

Type	Key features	Example(s)
Standard	Polarity determined by regional powers	Middle East, South America, Southeast Asia, Horn, Southern Africa
Centred		
Superpower	Unipolar centred on a superpower	North America
Great power	Unipolar centred on a great power	CIS, potentially South Asia
[Regional power]	Unipolar centred on a regional power	none
Institutional	Region acquires actor quality through institutions	EU
Great power	Bi- or multipolar with great powers as the regional poles	Pre-1945 Europe, East Asia
Supercomplexes	Strong interregional level of security dynamics arising from great power spillover into adjacent regions	East and South Asia

Sumber: *Regions and Powers* (Buzan & Weaver, 2003)

Buzan pada bukunya yang berjudul *People, States and Fear* (1991) memaparkan bahwa terdapat empat level analisis untuk analisis keamanan, yaitu:

1. Domestik, pada level ini yang menjadi fokus analisis adalah negara, baik itu negara yang kuat maupun lemah. Isu yang dianalisis pada level ini adalah tingkat persatuan dari sosial politiknya dan kekerasan politik domestiknya.
2. Regional, fokus analisis pada level ini adalah *regional security complex* dengan isu interdependensi keamanan, *amity/enmity*, polaritas, *subcomplexes*.
3. Inter-Regional, berfokus pada isu hubungan yang lintas batas atau hubungan antar kawasan.
4. Global, fokus analisisnya berfokus pada tingkat yang lebih tinggi lagi dan *global security complex* dengan isu kekuatan negara adidaya dan pengaruhnya terhadap keamanan kawasan.

Berdasarkan level analisis yang telah dipaparkan diatas, peneliti akan menggunakan level analisis regional dan inter-regional untuk menganalisis

mengenai pembentukan Quad sebagai respon terhadap BRI Tiongkok melalui agenda keamanannya. Level analisis ini akan menjelaskan mengenai hubungan *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan) dari negara-negara yang berada di kawasan sehingga dapat melihat penyebab dari pembentukan Quad. Selain itu, konsep ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana Quad kedepannya dan pengaruhnya terhadap keamanan kawasan khususnya terhadap negara-negara sekitarnya. Hal ini sesuai dengan dengan asumsi dasar dari teori *regional security complex* yang beranggapan bahwa negara yang berada dalam satu kawasan memiliki interdependensi keamanan terutama bagi negara-negara yang memiliki jarak berdekatan (Buzan, 2003).